

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang dinilai masih belum optimal. Hal tersebut dinyatakan demikian karena untuk menjerat pelaku kejahatan perdagangan orang ke persidangan sangat sulit, biasanya pelaku kejahatan tersebut melibatkan orang lain atau instansi/lembaga, sehingga kejahatan tersebut dapat berjalan secara terorganisir dan terencana dengan baik. Pada penelitian ini menganalisis sebuah kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan dalam perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Pmk. Dalam putusan tersebut terdapat dakwaan jaksa penuntut umum yang hanya menetapkan pelaku tindak pidana kepada seseorang yang bernama Nahrawi, padahal dalam kasus penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri secara ilegal sebagaimana pada Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Pmk Nahrawi melibatkan orang lain. Sehingga untuk menjerat para pelaku kejahatan tersebut seharusnya menggunakan ajaran penyertaan.

Pada penelitian ini digunakanlah jenis penelitian hukum normatif dengan disertai penelitian lapangan di Kejaksaan negeri Pamekasan sebagai data penunjang penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan dengan cara pengumpulan data ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan lalu dikaitkan dengan objek yang diteliti. Tujuan dilakukannya hal demikian adalah untuk menyoroti hukum sebagai suatu yang dicita-citakan (*das sollen*) dan menjadikannya perbandingan dengan kondisi hukum dalam keadaan yang nyata (*das sein*). Untuk menjawab isu yang dihadapi pada skripsi ini, maka digunakanlah teori atau ajaran penyertaan sebagai pisau analisis. Analisis dilakukan dengan membaca secara cermat Putusan Hakim yang menilai fakta perbuatan dan petunjuk dalam pemeriksaan persidangan kemudian dijelaskan ke dalam pembuktian dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Penyertaan, Jaksa Penuntut Umum

ABSTRACT

Law enforcement against crime trafficking people is judged to be less than optimal. That is so stated because to ensnare the perpetrators of trafficking in court is so difficult, usually the perpetrator involves another person or agency, so that the crime can be organized and well planned. On this study analyzes a case in the court's ruling Pamekasan in case number 65/Pid.Sus/2020/PN.Pmk. In the case of the ruling, there is a public prosecutor's indictment that would only assign a criminal to a person named Nahrawi, when in the case of Indonesian migrant workers illegally overseas, as at the verdict of number 65/Pid.Sus/2020/PN.Pmk Nahrawi covering everybody else. So to ensnare the perpetrators should have used inclusion doctrine.

In this study, normative legal research has been used, accompanied by field research in the attorney general's office, Pamekasan as data support for research literature. In a normative law study, analysis was done by way of a data collection of regulations and then linked to a study object. The purpose of such doing was to highlight the law as something to be expected (*das sollen*) and make it comparable to a legal condition in reality (*das sein*). To address the issues faced in the thesis, so the application of the theory or doctrine as the knife of analysis is employed. Analysis is done by carefully reading the verdict of the judge who assesses the fact of the deed and the evidence in the examination of the trial and is then explained into evidence of the crimes committed.

Key Words: Trafficking People, Inclusion, Public Prosecutors